SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI COVID-19 DI DESA MEKAR HARAPAN KECAMATAN SUNGAI LAUR KABUPATEN KETAPANG

Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Kajian Kebijakan Publik

Oleh:

Wel Hel Mena
NIM. E1011171124

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2024

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI COVID-19 DI DESA MEKAR HARAPAN KECAMATAN SUNGAI LAUR KABUPATEN KETAPANG

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Kajian Kebijakan Publik

Oleh :

Wel Hel Mena
NIM. E1011171124

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2024

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI COVID-19 DI DESA MEKAR HARAPAN KECAMATAN SUNGAI LAUR KABUPATEN KETAPANG

Tanggung Jawab Yuridis Pada :

Wel Hel Mena

NIM. E1011171124

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing Utama

Dr. H. Rusdiono, M.Si **Tanggal:** 22/07/2024
NIP. 196403171988101001

Dosen Pembimbing Pembantu

Bima Sujendra, S.IP, M.Si **Tanggal:** 22/07/2024
NIP. 198805072014041002

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI COVID-19 DI DESA MEKAR HARAPAN KECAMATAN SUNGAI LAUR KABUPATEN KETAPANG

Oleh:

Wel Hel Mena

NIM: E1011171124

Dipertahankan di	**: Fisip Untan**
Pada Hari/Tanggal	**: Selasa/30 Juli 2024**
Waktu	**: 12.00-Selesai**
Tempat	**: Ruang Sidang 2**

Tim Penguji

Ketua

Dr. H. Rusdiono, M.Si
NIP. 196403171988101001

Sekretaris

Bima Sujendra, S.IP, M.Si
NIP. 198805072014041002

Pembahas Utama

Dr. Yulius Yohanes, M.Si
NIP. 196405271992021001

Pembahas Pendamping

H. Dhidik Aprianto, SE, M.Si
NIP. 197604052006041001

Disahkan Oleh
Dekan Fisip Untan

Dr. Herlan, S.Sos., M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRACT

Wel Hel Mena: Implementation of the Covid-19 Direct Cash Assistance Policy in Sungai Laur Sub-District, Ketapang Regency. Undergraduate Thesis: Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak, 2024.

The purpose of this study is to identify and explain the factors that affect the implementation of the Covid-19 Direct Cash Assistance (BLT) policy in Sungai Laur Subdistrict, Ketapang Regency. Challenges in the Covid-19 BLT policy implementation in Sungai Laur Subdistrict include the failure to fully optimize the assistance given to the community and the failure to target the Covid-19 BLT appropriately. This research employed descriptive research technique with a qualitative orientation. The study is based on Van Meter and Van Horn's theory, which identifies six variables that influence policy implementation: 1) Policy Standards and Goals: The study finds out that the size and goal of the policy are well defined and understood by the implementers; 2) Resources: The study revealed that there was a lack of resources in the organization especially in human resources, financial resources and time; 3) Characteristics of Implementing Agents: The study reveals that the Covid-19 BLT policy has entailed collaboration with formal organizations; 4) Communication between Organizations: The conclusion is that the size and goals of the Covid-19 BLT policy have not been fully disseminated to all the residents of Sungai Laur Sub-District; 5) Disposition: The implementers have a clear perception of their roles, responsibilities and the objectives of the policy; 6) Economic, Social, and Political Environment: Lack of resources is one of the reasons that led to the improper distribution of the Covid-19 BLT to the community. The researcher therefore recommended that the implementers should improve distribution of assistance in order to achieve an equal distribution and increase outreach to the community.

Keywords: *Implementation, Policy, Covid-19 Direct Cash Assistance*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA UPT. BAHASA

ABSTRAK

Wel Hel Mena: Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Covid-19 di Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang. **SKRIPSI: Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosisal dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, 2024.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsiskan faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Covid-19 di Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang. Permasalahan dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Covid-19 di Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang diantaran masih kurangnya pengeoptimalan bantuan kepada masyarakat dan bantuan bantuan langsung tunai Covid-19 belum tepat sasaran. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn, terdapat 6 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu: 1). Ukuran dan Tujuan Kebijakan, kesimpulan hasil penelitiannya adalah ukuran dan tujuan sudah jelas dan sudah dipahami oleh para impelmentor. 2). Sumber Daya, hasil penelitiannya adalah sumber daya masih mengalami kekurangan dari segi jumlah sumber daya menusia, finansial dan waktu. 3) Karakteristik agen pelaksana, hasil penelitiannya adalah dalam implementasi kebijakan bantuan langsung tunai covid-19 sudah bekerja sama dengan organisasi formal. 4). Komunikasi antar organisasi, kesimpulannya adalah ukuran dan tujuan dari kebijakan bantuan langsung tunai covid-19 belum dapat tersampaikan ke semua masyarakat di Kecamatan Sungai Laur. 5). Sikap/Kecenderungan (Disposition), kesimpulannya implementor sudah memahami terkait tugas, fungsi dan tujuan dari kebijakan. 6). Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik. Suber daya yang rendah menjadi salah satu faktor kurang tepatnya pembagian bantuan langsung tunai covid-19 kepada masyarakat. Adapun saran yang direkomendasikan peneliti, agar implementor memaksimalkan pembagian bantuan agar merata dan sosialisasi kepada masyarakat.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Bantuan Langsung Tunai Covid-19.

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul *"Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Covid-19 di Desa Mekar Harapan Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang".* Judul ini dipilih karena bantuan langsung tunai covid-19 belum optimal dan tepat sasaran di Desa Mekar Harapan, sehingga dalam pembagian bantuan masih banyak masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan namun tidak mendapatkan bantuan. Dan belum meratanya sosialisai kepada masyarakat mengenai bantuan tunai covid-19 ini sehingga banyak masyarakat bertanya-tanya kenapa mereka tidak dapat bantuan. Kebijakan Bantuan langsung Tunai Covid-19 belum bisa berjalan dengan optimal.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa kinerja Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Covid-19 di Desa Mekar Harapan Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang belum terlaksana dengan optimal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian deskriptif ini dimaksud untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena yang ada dilapangan dengan menggambarkan atau meluruskan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya.

Hasil penelitian ini meliputi, 1). Ukuran dan Tujuan Kebijakan, hasil penelitiannya adalah ukuran dan tujuan sudah jelas dan sudah dipahami oleh para implementor. 2). Sumber Daya, hasil penelitiannya adalah sumber daya manusia di Kantor Desa Mekar Harapan untuk melaksanakan bantuan langsung tunai covid-19 belum memadai dari segi jumlah dan kemampuan, kurangnya sumber daya finansial berdampak pada kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana di kantor desa

sebagai penunjang layanan dan waktu yang terbatas mempengaruhi jalannya kegiatan sosialisasi. 3) Karakteristik agen pelaksana, hasil penelitiannya adalah dalam implementasi kebijakan bantuan langsung tunai covid-19 sudah berkerjasama dengan organisasi informal.

4). Komunikasi Antar Organisasi, komunikasi antara pelaksana kebijakan dengan target group (masyarakat) belum berjalan optimal, karena ukuran dan tujuan dari kebijakan bantuan langsung tunai covid-19 belum tersampaikan ke semua masyarakat di Desa Mekar Harapan. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya waktu dan belum ada sosialisasi yang dilakukan oleh para pelaksana bantuan langsung tunai covid-19 di Desa Mekar Harapan. 5). Sikap/Kecenderungan (Disposition), implementor sudah memahami terkait tugas, fungsi dan tujuan dari kebijakan bantuang langsung tunai covid-19.

6). Ekonomi yang rendah menjadi salah satu faktor penyebab pendapatan masyarakat selama pandemi covid-19 berlangsung menjadi berkurang. Kondisi sosial masyarakat terkait tingkat pendidikan yang rendah. Dengan banyaknya masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah, hal ini juga mempengaruhi pemahaman mereka terkait dengan kriteria KPM sebagai syarat penerima bantuan langsung tunai covid-19.

berkaitan dengan kondisi politik, sejauh ini para elite politik sangat mendukung adanya bantuan langsung tunai covid-19.

Saran dari peneliti untuk implementasi kebijakan bantuan langsung tunai covid-19 di Desa Mekar Harapan Kecamatan Sungai Laur agar lebih mengoptimalkan lagi pembagian bantuan kepada masyarakat dan lebih

memperhatikan seperti apa kriteria masyarakat sebagai penerima bantaun langsung tunai covid-19.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wel Hel Mena

Nim : E1011171124

Program Studi :Ilmu Administrasi Publik

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memproleh gelar kesarjanaan disuatu pergurua tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 20 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



(Wel Hel Mena)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

"Allah Tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya Bersama Kesulitan ada kemudahan".
(QS. Al-Insyirah:5-6)

"Terlambat Bukan Bearti Gagal, Cepat Bukan Bearti Hebat. Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda. Percaya proses itu yang paling penting. Karena Allah telah mempersiapkan hal baik dibalik Kata Proses yang kamu anggap rumit dan melelahkan. Bukankah sebaik-bainya skripsi, adalah skripsi yang selesai?"
(Penulis)

Sujud syukur ku sembahkan kepadaMu ya Allah, yang telah mempermudah segala urusan saya dalam menyusun skripsi ini. Skripsi ini penulis dedikasikan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda **Mahrol Utaf** dan Ibunda **Mewa** yang tanpa hentinya memberikan doa, dukungan, motivasi dan kasih sayang serta pengorbanan moril maupun material. Sehingga saya dapat menempuh pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi dan mampu menyelesaikan skipsi ini.
2. Adik Kandung saya **Gunawan** dan nenek saya **Asnah** (Almh) serta keluarga besar saya yang telah memberikan bantuan, saran, semangat dan motivasi selama perkuliahan sampai penulisan skripsi.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga pada kesempatan ini penulis bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dengan judul "Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Covid-19 di Desa Mekar Harapan Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang. Skripsi ini disusun sebagai kewajiban yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan berbagai bantuan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada.

1. Dr. Herlan, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak dan beserta jajaranya.
2. Dr. H. Rusdiono, M,Si selaku Pembimbing Utama dan Bapak Bima Sujendra, S. IP, M.Si selaku Pembimbing pendamping yang telah memberikan kemudahan dan arahan, motivasi dan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini.
3. Dr. Yulius Yohanes, M.Si selaku Dosen Penguji Pertama dan Dhihik Aprianto SE, M.Si selaku Penguji Pendamping yang telah banyak memberikansaran serta masukan untuk memperbaiki penulisan skripsi ini.
4. Dr. Dedi Kunadi M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) selama menjalani perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Tanjungpura Pontianak.

5. Dr. Yulius Yohanes, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administasi Publik Fisip Utan.
6. Kepala Desa Mekar Harapan, para perangkat desa, serta masyarakat Desa Mekar Harapan yang telah banyak membantu dalam penulisan hingga penyusunan skripsi ini hingga selesai.
7. Keluarga besar, teman dekat, dan teman-teman IAP angkatatan 2017 yang selalu memberikan dukungan motivasi kepada penulis hingga selesai menjalani perkuliahan.
8. Teman dan sahabat saya yang telah membantu serta memberikan motivasi selama perkuliahan dan proses pembuatan skripsi.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang banyak membantu sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan, bantuan, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT, dan hasil karya penulis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran serta manfaat yang cukup berarti bagi kita semua yang membutuhkan. Aamiin.

Pontianak, 20 Juli 2024

Wel Hel Mena
Nim: E1011171124

DAFTAR ISI

ABSTRAK vii
RINGKASAN SKRIPSI viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN xi
KATA PENGANTAR xiiii
DAFTAR ISI xiv
DAFTAR TABEL xviivii
DAFTAR GAMBAR xviiiii
DAFTAR LAMPIRAN xix
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Identifikasi Masalah 11
1.3 Fokus Penelitian 11
1.4 Rumusan Masalah 11
1.5 Tujuan Penelitian 11
1.6 Manfaat Penelitian 12
BAB II KAJIAN PUSTAKA 13
2.1 Teori 13
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik 13
2.1.2 Dimensi Kebijakan Publik 14
2.1.3 Tahapan Kebijakan Publik 15
2.1.4 Model-Model Kebijakan Publik 19
2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik 21
2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implemntasi Kebijakan 23
2.4 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik 24
2.5 Hasil Penelitian yang Relevan 26
2.6 Kerangka Pikir Penelitian 27
2.7 Pertanyaan Penelitian 28
BAB III METODE PENELITIAN 29
3.1 Jenis Penelitian 29
3.2 Langkah-Langkah Penelitian 30
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 30

3.3.1 Lokasi Penelitian 30
3.4 Subjek Dan Objek Penelitian 31
3.5 Sumber Data 32
3.6 Instrumen Penelitian 32
3.7 Teknik Pengumpulan Data 33
3.8 Teknik Analisis Data 34
3.9 Teknik Keabsahan Data 35
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 36
4.1. Keadaan Geografis Desa Mekar Harapan 36
4.2. Iklim Wilayah Desa Mekar Harapan 37
4.3. Keadaan Tanah dan Luas Penggunaan Lahan Desa Mekar Harapan 37
4.4. Demografi Desa Mekar Harapan 38
4.4.1 Kondisi Kependudukan Desa Mekar Harapan 38
4.4.2 Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Desa Mekar Harapan 39
4.4.3 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Mekar Harapan 40
4.4.4 Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencarian Pokok Desa Mekar Harapan…… 41
4.4.5 Kepercanyaan Agama Desa Mekar Harapan 42
4.5. Lembaga Kemasyarakatan Desa Mekar Harapan 43
4.6. Sarana dan Prasarana 44
4.6.1. Sarana dan Prasarana Pendidikan 44
4.6.2. Sarana dan Prasaranan Kesehatan 45
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 47
5.1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Covid-19 di Desa Mekar Harapan Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang 47
5.1.1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan dalam Implementasi Bantuan Langsung Tunai Covid-19 di Desa Mekar Harapan 47
5.1.2. Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Covid-19 di Desa Mekar Harapan 50
5.1.2.1 Sumber Daya Manusia dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Covid-19 di Desa Mekar Harapan 51
5.1.3. Karakteristik Agen Pelaksana dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Covid-19 di Desa Mekar Harapan 59
5.1.4. Sikap/Kecendrungan *(Disposition)* Para Pelaksana Dalam Implementasi Kebijakan Bantuang Langsung Tunai di Desa Mekar Harapan 63
5.1.5. Komunikasi Antar Organisasi dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Covid-19 di Desa Mekar Harapan 73

5.1.6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Covid-19 di Desa Mekar Harapan ……77

5.1.6.1Kondisi Lingkungan Sosial dan Ekonomi dalam Implementasikan Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Covid-19 di Desa Mekar Harapan 77

5.1.6.2 Kondisi Politik dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Covid-19 di Desa Mekar Harapan 80

BAB VI PENUTUP 82

6.1. Simpulan..... 82

6.2. Saran..... 85

DAFTAR PUSTAKA 88

DAFTAR TABEL

Tabel *halaman*

1.1 Angka Kemiskinan Kabupaten Ketapang Tahun 2017-202 4
1.2 Data Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Covid-19 Desa Mekar Harapan Tahun 2024 5
3.1 Waktu Penelitian 31
4.1 Luas Penggunaan Lahan Desa Mekar Harapan 37
4.2 Jumlah Kependudukan Desa Mekar Harapan 39
4.3 Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Desa Mekar Harapan 39
4.4 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Mekar Harapan 40
4.5 Penduduk Mata Pencarian Pokok Desa Mekar Harapan 41
4.6 Kepercanyaan Agama Menurut Suku Desa Mekar Harapan 42
4.7 Lembaga Kemasyarakatan Desa Mekar Harapan 44
4.8 Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa Mekar Harapan 45
4.9 Sarana dan prasarana Kesehatan Desa Mekar Harapan 46
5.1 Nama-nama penerima BLT di Desa Mekar Harapan 52
5.2 Data Sarana dan Prasarana di Kantor Desa Mekar Harapan Tahun 2022 57
5.3 Kriteria Keluarga Miskin 66
5.4 Keluarga Penerima Manfaat BLT Covid-19 Desa Mekar Harapan 67

DAFTAR GAMBAR

Gambar *halaman*

4.1 Peta Desa Mekar Harapan Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang..... 36

5.1 Pembagian Bantuan 61

5.2 Pembagian Bantuan 62

5.3 Pembagian Bantuan Kepada Masyarakat Desa Mekar Harapan..... 63

5.4 Rumah Warga Desa Mekar Harapan Tahun 2022 72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran *halaman*

1. Pedoman Wawancara 90

2. NAMA SUBJEK ATAU INFORMAN 92

3. PEDOMAN OBSERVASI 93

DOKUMENTASI 94

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 97

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bantuan langsung tunai merupakan program yang bertujuan untuk menunrunkan jumlah warga miskin. Hal itu dia buktikan dengan bukti bahwa pada tahun 2007 warga miskin berjumlah 37 juta, namun berkurang pada tahun 2008 menjadi 35 juga warga miskin. Untuk warga yang terdampak covid-19 BLT dapat menjaga daya beli masyarakat dan melepas keterpurukan. Untuk saat ini mengenai penaggulangan dampak dari covid-19 agar masyarakat tetap sejahtera pemerintah pun mengeluarkan sebuah kebijakan bantuan dana yang berupa BLT yang dimana warga itu sendiri kehilangan pekerjaannya sebagai sumber dana kehidupan sehari hari. Pemerintah terus mengahadirkan program bantuan langsung tunai (BLT) bantuan sosial hingga subsidi untuk membantu warga yang terkena dampak dari pendemi covid-19**.**

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia tidak hanya menyebabkan krisis kesehatan, tetapi juga krisis social dan ekonomi, pendemi covid ini juga menyebabkan menurunnya aktivitas perekonmian, yang tidak menutup kemungkinan akan menrunnya kesejahtraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi di proyeksikan hanya pada kisaran 0,4% hingga 2,3%, menurun dengan signifikan jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 5%.

Pandemi Covid-19 ini mengenai banyak sektor usaha, sehingga terjadinya pemutusan hubungan kerja, dan juga menurunkan penyerapan tenaga kerja.

Jika kondisi ini tidak diantisipasi dengan baik, diperkirakan bisa terjadinya ketidstabilan sosial. Dalam jangka panjang, kesenjangan antar kelompok pendapatan akan melebar, disparitas antar wilayah dan kota-kota akan meningkat, serta berdampak pada terjadinya kemiskinan antar generasi.

Pandemi Covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sektor, taidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Untuk saat ini memang dampak Covid-19 lebih dirasakan oleh masyarakat diperkotaan. Namun, mengingat pekerja musiman memiliki mobilitas cukup tinggi, dari desa kekota lalu kembali ke desa dan juga seperti mudik lebaran pada 2022 lalu, hal ini tidak menutup kemungkinan virus corona juga bisa menyebar di desa. Bentuk responsive pemerintah untuk menangani krisis perekonomian tersebut, pemeritah membuat banyak kebijakan, dan menerapkan program-program Jaringan Pengamanan Sosial (JPS) yang mencakup salah satunya, Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Bantuan langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah bantuan uang yang berasal dari dana desa, yang berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa. Dalam peraturan tersebut diatur penggunaan dana desa untuk pencegahan dan penanganan Covid-19, padat karya Tunai Desa dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Tujuan kebijakan BLT Dana Desa ini adalah untuk menjaga kemampuan daya beli penduduk miskin di desa akibat perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh merebaknya wabah Covid-19 dan untuk memenuhi

kebutuhan dasar penduduk miskin.

Berdasarkan peraturan mentasi desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi (PDTT) No. 6 Tahun 2020, semua Desa diminta untuk mengalokasikan 25%-35% dana tahun anggaran 2020 untuk kebutuhan BLT Dana Desa. Adapun nilai Bantuan Langsung Tunai Covid-19 diberikan kepada kelurga miskin dengan memenuhi kriteria penerima sebesar Rp 600.000,00 dan diterima selama 3 (tiga) bulan dan Rp. 300.000,00 untuk tiga bulan berikutnya.

Penerima Bantuan Langsung Tunai Covid-19 adalah keluarga miskin dalam Data Terpadu Kesejehtraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (exclusion error) yang memenuhi kriteria berikut:

1. Tidak mendapat bantuan PKH/BNPT/ pemilik Kartu Prakerja
2. Mengalami kehilangan mata pencaharian mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan)
3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis

Keluarga miskin yang tidak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Covid-19 yaitu yang setidaknya dapat memenuhi 9 dari 14 kriteria yang telah ditentukan KEMENSOS RI, Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 146/HUK/2013 Tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Dalam penentuan penerima Bantuan Langsung Tunai Covid-19, pemerintah menyerahkan wewenang sepenuhnya kepada desa sendiri yang dalam penentaun penerima mengikuti kriteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta dapat

dipertanggungjawabkan secara hukum.

Peneliti memilih Program Bantuan Langsung Langsung Tunai covid-19 diangkat menjadi penelitian skripsi ini karena peneliti tertarik tarkait kemiskinan di kabupaten ketapang. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa Kabupaten ketapang menduduki perngkat ketiga tertinggi di Kalimantan Barat setelah Kabupaten Melawi dan Kabupaten Landak. Covid-19 yang sudah menyebar di kabupaten ketapang juga tidak menutup kemungkinan akan menjadi faktor bertambahnya angka kemiskinan di kabupaten ketapang. Secara lebih rinci angka kemiskinan Kabupaten Ketapang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1

Angka Kemiskinan Kabupaten Ketapang Tahun 2017-2021

Indikator Kemiskinan	**Indikator kemiskinan**				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk Miskin (000 Jiwa)	54,28	54,86	53,84	53,45	53,04
Persentase Penduduk Miskin	11,02	10,93	10,54	10,29	10,13
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,63	2,00	1,51	1,61	1,42
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,40	0,64	0,37	0,39	0,32
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)	391 868,00	432 354,00	454 160,00	468 450,00	482 824,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ketapang Tahun 2021

Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Mekar Harapan diimplementasikan pada awal Januari 2022. Berdasarkan perolehan data pada awal observasi Desa Mekar Harapan, mengalokasi 28,7% dana untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Covid-19) yang diterima yaitu sebesar Rp. 187.508.062.00 dengan jumlah penerima bantuan 107 orang penerima. Desa

Mekar Harapan sudah mengalokasikan sebanyak 6 tahap penyaluran pada tahun 2022. Berikut tabel data penyaluran Bantuan Langsung Tunai Covid-19 di Desa Mekar Harapan Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang.

Tabel 1.2
Data Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Covid-19 Desa Mekar Harapan Tahun 2022

No	Bulan	Jumlah penerima BLT Covid-19	Tahap penyaluran	Jumlah dana disalurkan
1	Januari	106	I	Rp 57.000,000
2	Februari	106	II	Rp 57.000,000
3	Maret	106	III	Rp 57.000,000
4	April	107	IV	Rp 28.800,000
5	Mei	107	V	Rp 28.800,000
6	Juni	107	VI	Rp 28.800,000

Sumber: Kantor Desa Mekar Harapan Tahun 2022

Berdasarkan Tabel di atas Bantuan Langsung Tunai Covid-19 di Desa mekar Harapan sudah disalurkan 6 kali dengan keluarga penerima manfaat bantuan tahap 1 sampai tahap 3 berjumlah 106 penerima, dengan dana yang di salurkan pertahap Rp 57.000,000,00. Dan pada tahap 4 sampai dengan tahap 6 adanya penambahan keluarga penerima manfaat bantuan sehingga jumlah penerima menjadi 107 kepala keluarga, dengan dana yang disalurkan per tahap berjumlah Rp 28.800.000,00 jumlah dana yang disalurkan pada tahap ini berbeda dengan tahap 1 sampai pada tahap 3 sebelumnya karena berdasarkan instruksi bahwa 3 bulan selanjutnya penerima bantuan akan menerima bantuan hanya Rp 300.000,00.

Meskipun sejauh ini dana bantuan langsung tunai sudah disalurkan oleh pemerintah desa mekar harapan kepada masyarakat, namun masih menyisakan permasalahan dalam Implementasi Bantuan Langsung Tunai itu sendiri. Penerepan suatu program yang efektif merupakan dari kemampuan pihak pelaksana atau implementor dalam menjalankan program atau kebijakan. Namun permasalahan di lapangan bantuan langsung tunai desa mekar harapan implementornya baik, desa dan tim pelaksana tidak bisa berbuat banyak karena bantuan langsung tunai covid-19 ini dapat dikatakan kebijakan kilat, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya para implementor belum optimal. Dalam pembentukan panitia pelaksana bantuan desamekar harapan, ternyata tidak melalui mekanisme tertentu yang mempertimbangkan kapasitas calon anggota atau sumber daya manusia yang dibutuhkan melainkan ditunjuk langsung. Panitia pelaksana bantuan Desa Mekar Harapan Kurang memperhatikan klasifikasi atau kriteria penerima yang telah di tentukan untuk menentukan yang berhak menerima atau tidak bantuan langsung tunai covid-19 ini. Hal ini membuat Bantuan Langsung Tunai Covid-19 di Desa Mekar Harapan tidak tepat sasaran. Disamping itu tidak adanya layanan pengaduan yang aktif bagi masyarakat untuk menyuarakan haknya. Aktivitas aplikasi atau penerapan suatu program perlu kegiatan yang mendukung untuk mewujudkan keberhasilan. Masyarakat desa mekar harapan masih belum memahami sepenuhnya mekanisme pelaksanaan dan tujuan bantuan langsung tunai covid-19 ini, hal ini karena kurangnya pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Dari permasalahan tersebut yang di temukan dalam Implementasi

Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Covid-19 di Desa Mekar Harapan, hal ini menandakan bahwa, proses Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Covid-19 di Desa Mekar Harapan tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan tujuan dari kebijakan Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Covid-19 yang telah ditetapkan.

Pemerintah juga menyiapkan sunbsidi bagi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), subsidi listrik, bantuan sosial melalui program Kartu Prakerja dan BLT Dana Desa. Syarat penerimanya adalah keluarga miskin yang bukan termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH), tidak memproleh Kartu Sembako dan Kartu Prakeja. Dalam pelaksanaanya meliputi tahap calon penerima yang mengacu pada data terpadu kesejahtraan sosial (DTKS), data warga miskin, warga miskin kehilangan pekerjaan, atau memiliki anggota keluarga mempunyai penyakit kronis, serta warga miskin terdampak ekonomi karena kehilangan pekerjaan. Pendataan calon penerima BLT Desa mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial. Ketentuan mengenai mekanisme pendataan, penetapan data penerima manfaat, dan pelaksanaan pemberiaan BLT Desa dilakukan sesuai ketentuan Menteri Desa PDTT. BLT dianggarkan dalam APBDes maksimal sebesar 25%-35% dari Dana Desa atau lebih dengan persetujuan pemerintah kabupaten/kotamadya. Penyaluran Dana Desa juga dipermudah melalui penyederhanaan dokumen dan penyaluran yang diupayakan agar lebih cepat. Kepala Desa merupakan pihak yang bertanggungjawab atas penggunaan, penyaluran atas BLT Desa. BLT Dana Desa merupakan program

prioritas yang harus dianggarkan oleh Pemerintah Desa. Jika Pemerintah Desa tidak menganggarkan BLT Dana Desa, Pemerintah Desa akan dikenakan sanksi mulai dari pemotongan sebesar 50% untuk penyaluran Dana Desa tahap berikutnya hingga penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu tindakan yang diambil pemerintah kita untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu atau yang membutuhkan di Indonesia. Tingkat kesejahteraan di negara kita anggap masih sangat kurang dikarenakan masih begitu banyak masyarakat yang memiliki kehidupan kurang layak yang diakibatkan oleh beragai faktor, sperti pengangguran, kemiskinan dan lain-lain. Apalagi ditengah pandemi covid-19 banyak sekali masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya.

Berdasarkan pengamatan peneliti, Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 di Desa Mekar Harapan Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang, dalam implementasinya masih belum maksimal, dan masih mengandung pertanyaan. Misalnaya seperti rendahnya sosialisasi, dan dalam proses implementasi BLT Covid 19 masih belum tepat sasaran. Hal tersebut terjadi karena masih terdapat berbagai kendala yang terjadi. Dengan demikian, melihat dari berbagai kendala yang terjadi peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut faktor-faktor apa saja yang menjadi faktor pengambat dan faktor pendukung Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 di Desa Mekar Harapan Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang.

Implementasi Kebijakan tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 Di Desa Mekar Harapan Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang banyak mengalami masalah dan kendala yaitu sebagai berikut. Permasalahannya ketidak tepatan sasaran bantuan langsung tunai dalam penyalurannya, dan adanya ketidak sesuaian data penerima Bantuan Langsung Tunai Covid-19 dengan realitas kondisi ekomomi masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai Covid-19 tersebut. Yang dikategorikan sebagai orang mampu menerima BLT Covid-19 tersebut, sedangkan yang tidak mampu tidak menerima BLT Covid-19. Serta adanya pembagian uang BLT Covid-19 kepada masyarakat tidak penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn, dalam teori ini ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu sebagai berikut:

Ada enam variabel, menurut Van Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu sebagai berikut:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

   Kinerja implementasi dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatatakan berhasil.
2. Sumberdaya

   Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Tetapi

ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Tetapi diluar sumberdaya manusia, sumberdaya-sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah: sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu. Karena mau tidak mau, Ketika sumberdaya manusia yang kompeten telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui aggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoaalan publik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. Demikian pula halnya dengan sumberdaya waktu. Saat sumberdaya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebagian ketidakberhasilan implementasi kebijakan.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

   Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplemtasiaan kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan dengan para agen pelaksanaannya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.
4. Sikap/Kecendrungan (*Dispasition*) para Pelaksana.

   Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implemtasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan adalah kebijakan "dari atas" (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang ingin warga selesaikan.
5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

   Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implemtasi, maka asumsinya keselaham-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya.
6. Lingkungan Ekonomi. Sosial, dan Politik

   Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti, maka yang menjadi indentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Masih belum terealisasikan dengan baik Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT Covid-19) tidak tepat saran.
2. Kurang efektifnya pendataan dalam menentukan pemberian Bantuan langsung Tunai (BLT Covid-19).
3. Masih kurangnya komunikasi dengan masyarkat.

1.3 Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini ditujukan pada kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Covid-19 ketika masa pandemi di Desa Mekar Harapan Kecamatan Sungai Laur.

1.4 Rumusan Masalah

Dari identifikasi dan fokus permaslahan diatas yang menjadi rumusan masalah yaitu, Mengapa Proses Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 Di Desa Mekar Harapan Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang belum optimal?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 Di Desa Mekar Harapan Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang yang belum berjalan secara optimal.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi, pelengkap referensi, serta menjadi sumber pemikiran yang bermanfaat, khususnya bagi program studi Ilmu Administrasi Publik, Kajian Kebijakan Publik serta menjadi referensi untuk penelitian dimasa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

1. Menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah desa dalam membagikan bantuan kedepannya agar lebih optimal.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 di Desa Makar Harapan Kecamatan Sungai Laur.
3. Memberikan inspirasi penelitian lebih lanjut, penelitian selanjutnya dapat menggunakan topik yang mirip dengan tetap mencari celah dari penelitian sebelumnya yang dapat lebih dikembangkan untuk peneliti lebih lanjut.